

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirdjo, Pradjudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mahfud MD, Moh.. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Moenir. 1983. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta : Gunung Agung.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rakhmat, Muhamad. 2014. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung : LoGoz Publishing.
- SF, Marbun dkk. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negara Sipil*, Keni Media, Bandung, 2013.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. *Hukum Kepegawaian Dalam Praktek*. 1987. Surabaya : Usaha Nasional.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan dan Jabatan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung : CV. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018.

C. Jurnal

Rompis, Adrian E. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol.6. No.1 Juni 2012.

Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung. Universitas Parahyangan. 2000.

Sudrajat, Tedi. “Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil”. Civil Service. Vol. 11 No. 2. 2017.

Wirazilmustaan dkk. *Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas*. Jurnal Hukum Progresif. Volume XII No.2. Desember . 2018.

D. Internet

Administrator KASN. “7 Alasan PPK belum melakukan PTDH Terhadap ASN Berstatus Terpidana Korupsi”. diakses dari <https://www.kasn.go.id/detail/s/item/368-7-alasan-ppk-belum-melakukan-ptdh-terhadap-asn-berstatus-terpidana-korupsi>. pada tanggal 26 November 2019 pukul 04.33.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, *Evaluasi Pelaksanaan SKB Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri Dan Badan Kepegawaian Negara Terkait Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, diakses <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduhdokumen/seminar/file/5918-3-bkn> pada tanggal 5 maret 2019 pukul 02.11.

HUMAS MENPANRB. “480 PNS Terlibat Korupsi Diberhentikan Tidak Dengan Hormat”. diakses <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/480-pns-terlibat-korupsi-diberhentikan-tidak-dengan-hormat> pada tanggal 3 maret 2019 pukul 22.10.

HUMAS MENPANRB. “Sinergi Penegakan Hukum PNS Terlibat Tipikor, Disiapkan Sanksi untuk PPK dan PyB Bandel”. diakses <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sinergi-penegakan-hukum-pns-terlibat-tipikor-disiapkan-sanksi-untuk-ppk-dan-pyb-bandel>. pada tanggal 4 maret 2019 pukul 23.12.

Jurnaliston, Reza. “ICW: Aktor yang Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi adalahASN” diakses <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15470561/icw-aktor-yang-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi-adalah-asn/>. pada tanggal 3 Maret 2019 pukul 22.53.

Puspen Kemendagri.” MK Perkuat SKB Percepatan Pemberhentian PNS yang Sudah Inkrach Kasus Tipikor”. diakses dari <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/20472/mk-perkuat-skb-percepatan-pemberhentian-pns-yang-sudah-inkrach-kasus-tipikor>. pada tanggal 26 November 2019 pukul 22.49.

